

# **PENGARUH HAJI TERHADAP POLITIK ISLAM DI INDONESIA (TAHUN 1900-1945)**

**Eka Yudha Wibowo**

**Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta**

## **Abstract**

Hajj is one of the compulsory worship in Islam for every Muslim who has an ability to carry it out. Pilgrimage has given a new color to the new history of the struggle against colonialism in Indonesia, one of which is indicated by the emergence of Islamic political organizations in the period 1900-1945 AD. Hajj activities affect the attitudes and political organization with the emergence of Islamic political organizations were represented by Syarikat Islam then turned into PSII and Permi (Indonesian Muslim Unity Party). This study examines by looking at changes in thinking that occur after the pilgrimage to the effects of the birth of political organization. Changes may include an understanding of the religion and the political ideology thought to unify the spirit of unity of Muslims in this country, to fight for freedom and the struggle against the colonialist.

**Keywords:** Hajj, political organizations, struggle

## **Abstrak**

Haji merupakan salah satu ibadah wajib bagi setiap muslim yang telah mampu untuk melaksanakannya. Perjalanan ibadah haji telah memberikan warna sejarah baru bagi perjuangan Indonesia dalam melawan kolonialisme, salah satunya ditunjukkan dengan munculnya organisasi-organisasi politik Islam dalam kurun waktu 1900-1945 M. Aktifitas ibadah haji memengaruhi sikap dan organisasi politik dengan munculnya organisasi-organisasi politik

Islam yang direpresentasikan oleh Syarikat Islam kemudian berubah menjadi PSII dan Permi (Partai Persatuan Muslimin Indonesia). Kajian ini mencermati perubahan pemikiran yang terjadi setelah menunaikan ibadah haji terhadap pengaruh lahirnya organisasi politik. Perubahan tersebut dapat berupa pemahaman agama maupun pemikiran ideologi politik untuk menyatukan semangat persatuan umat Islam di Tanah Air dan menggelorakan perjuangan melawan penjajah.

**Kata kunci:** haji, organisasi politik, perjuangan.

## A. PENDAHULUAN

Kegiatan ibadah haji pada tahun-tahun pertengahan abad ke-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Banyak kegiatan yang mereka kerjakan sewaktu berada di tanah suci. Bagi kaum yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap nasib bangsanya mereka lebih memilih untuk tinggal di sana dan mempelajari berbagai bidang ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Bagi mereka yang langsung pulang setelah menunaikan haji tentunya juga memberikan dampak psikologis bagi dirinya sendiri dan memberikan pemahaman lebih mengenai Islam bagi orang lain. Mereka yang belajar di tanah suci pada abad 19 umumnya mempunyai tujuan selain untuk dapat memperoleh ilmu yang cukup ada juga yang mencari dukungan dari berbagai pihak untuk mengusir penjajah Indonesia melalui pembentukan organisasi-organisasi Islam.

Pemerintah kolonial Belanda saat menjajah Indonesia merasa perlu menerapkan kebijakan haji, bahkan mengirimkan seseorang untuk mempelajari dan meneliti kegiatan umat Islam saat melakukan ibadah ini. Tujuan politik itu adalah untuk melihat seberapa kuat pengaruhnya bagi pergerakan umat Islam di Indonesia. Pemerintah Belanda pun tidak melupakan kenyataan bahwa pelbagai perlawanan umat Islam memang banyak dimotori oleh para haji dan ulama.<sup>1</sup> Banyak kalangan Belanda yang berpendapat bahwa ibadah haji menyebabkan pribumi menjadi fanatik. Untuk lebih membatasi gerak umat Islam, dikeluarkanlah *ordonansi* yang antara lain berisi, larangan bagi umat Islam Indonesia pergi ke Makkah jika tidak mempunyai pas jalan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 3.

<sup>2</sup> Mursyidi Mr Sumuran, *Lintasan Sejarah Jamaah Haji Indonesia* (Jakarta: MARS-26, 1984), hlm. 12-13.

Dalam hal ini, Snouck Hurgronje berusaha mendudukkan masalah antara ibadah haji dan fanatisme. Menurutnya, haji-haji itu tidak berbahaya bagi kedudukan pemerintahan kolonial di Indonesia, yang mungkin sekali berbahaya ialah apa yang disebutnya sebagai *koloni Jawa*, yaitu daerah tempat tinggal orang-orang yang berasal dari Indonesia di Mekah. Mereka telah menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tentang persatuan kaum muslimin sedunia dikarenakan pergaulan hidup bertahun-tahun. Di sana mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha Pan-Islamisme.<sup>3</sup> Dengan begitu haji sangat ditakuti, *hajiphobia* sebagai bagian dari *Islamophobia*. Dikarenakan adanya pandangan seperti itu maka orang yang akan melaksanakan ibadah haji selalu dihalangi dengan jalan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari penguasa Belanda.<sup>4</sup>

Aktifitas ibadah haji yang dilakukan masyarakat Indonesia pada masa kolonial memengaruhi pemikiran politik orang Islam. Hal itu ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi politik Islam yang direpresentasikan oleh Syarikat Islam (SI) kemudian berubah menjadi PSII dan Permi (Persatuan Muslimin Indonesia). SI merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1912 oleh seorang haji bernama Samanhudi. SI tumbuh dari organisasi yang mendahuluinya yaitu Syarikat Dagang Islam (SDI) yang lahir pada 16 Oktober 1905. Tujuan organisasi ini untuk mengimbangi hegemoni Cina dalam perdagangan batik di Solo serta adanya tekanan politik dari para bangsawan. Adapun Permi merupakan sebuah partai yang pada awal mulanya berbentuk organisasi sosial dan keagamaan dalam bidang pendidikan (karena berkaitan erat dengan Sumatera Thawalib) yang didirikan pada tahun 1930. Permi kemudian mengalami transformasi menjadi partai politik setelah mendapat pengaruh yang kuat dari dua orang tokoh yang menunaikan haji dan belajar di Mesir, yaitu Haji Ilyas Jakub dan Mukhtar Lutfi.

Hal yang memunculkan kedua organisasi tersebut salah satunya berasal dari pengaruh ide-ide pemikiran politik Islam di Timur Tengah. Pengaruh pemikiran tersebut dibawa pulang ke Indonesia oleh ulama haji ketika mereka melihat bahwa umat Islam Indonesia sedang mengumpulkan dan menyatukan kekuatan melawan penjajah.

---

<sup>3</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1941* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 33.

<sup>4</sup> M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 291.

Permasalahan pokok dalam kajian ini ialah pengaruh yang timbul dari kaum muslimin sepulang dari menunaikan kewajiban ibadah haji baik sikap politiknya terhadap pemerintah kolonial maupun pemikiran-pemikiran politik Islam di Indonesia. Tahun 1900-1945, merupakan tahun ketika ibadah haji di Indonesia mengalami peningkatan secara drastis. Kajian ini juga difokuskan pada konsep politik yang bukan sekedar berarti kekuasaan pemerintahan semata, tetapi juga meliputi segala yang mengatur atau mengurus kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, terutama politik, ekonomi, dan pendidikan.<sup>5</sup>

## B. MASYARAKAT DAN POLITIK ISLAM INDONESIA PADA MASA KOLONIAL

Kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda masih terbelakang, dikarenakan sistem kolonialisme yang diterapkan bagi bangsa Indonesia terlalu ketat, baik dominasi politik, eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial, westernisasi kebudayaan, dan kristenisasi penduduk. Di lingkungan desa, hubungan masyarakat masih bersifat komunal, solidaritasnya terutama berdasarkan perasaan bersifat emosional. Diferensiasi dan spesialisasi masih rendah, warga desa pada umumnya adalah petani, maka dalam homogenitas seperti itu berkembanglah sistem tukar-menukar tenaga dan jasa berdasarkan prinsip timbal balik, suatu sistem *sumbangan rewang*, tolong menolong, *punjungan*, atau apa yang lazim secara umum disebut gotong royong.<sup>6</sup>

Pertanian dilakukan secara tradisonal, teknologi yang dipergunakan juga sederhana. Sebagian rakyat masih hidup dalam kekurangan dan keterbelakangan ekonomi. Perekonomian diorganisir berdasarkan sistem tanam paksa. Menurut sistem ini, pungutan dari rakyat tidak lagi berupa uang tetapi berupa hasil tanaman yang dapat diekspor.<sup>7</sup> Petani wajib menyerahkan 1/5 dari tanah mereka kepada pemerintah untuk tanaman tertentu, seperti tebu, nila, kopi, teh, tembakau, kayu manis, dan kapas. Mereka menyerahkan produksi pertanian sebagai upeti atau pajak. Petani juga diwajibkan menyumbangkan tenaganya untuk membangun saluran

---

<sup>5</sup> Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 7.

<sup>6</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium* (Jakarta: Gramedia Utama, 1999), hlm. 294.

<sup>7</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah*, hlm. 306.

irigasi, jalan, dan jembatan, membersihkan tanah kosong, bahkan untuk membangun infrastruktur perekonomian pada sebuah pulau.<sup>8</sup>

Dalam hal keagamaan sejak semula penduduk pribumi di Hindia Belanda lebih menghargai mistik daripada syariat. Aktivitas mistik lebih dipentingkan daripada menunaikan kewajiban keagamaan. Menurut Snouck, hal ini terjadi dikarenakan masih bercokolnya pengaruh Hindu dalam kehidupan masyarakat. Mereka memang beragama Islam, namun mereka tidak menjalankan syariat dan kewajiban agama seperti sembahyang dan puasa. Walaupun Islam di wilayah Hindia Belanda banyak bercampur dengan kepercayaan animisme dan Hindu, namun orang Islam di wilayah ini pada waktu itu memandang agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dari orang lain.<sup>9</sup>

Masalah sinkretisme agama Islam, terutama di kalangan suku Jawa, memang banyak disoroti oleh banyak orang. Pada awal abad ke-19, Snouck menyatakan bahwa orang Islam di kawasan ini sebenarnya hanya di permukaan saja memeluk Islam. Umat Islam pada masa penjajahan Belanda diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya. Akan tetapi Belanda akan menindak tegas segala sesuatu yang berhubungan dengan Pan-Islamisme.

Memasuki abad ke-19, VOC<sup>10</sup> dibubarkan dan Indonesia berada di bawah pemerintah Kerajaan Belanda. Meskipun gagal dalam perdagangan, perusahaan dagang Belanda ini berhasil dalam bidang politik. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di kepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam.<sup>11</sup> Belanda khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik, sementara di lain pihak Belanda meyakini bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan. Pemerintah Belanda belum berani mencampuri masalah Islam dan juga belum mempunyai kebijakan yang jelas mengenai masalah ini. Keengganan mencampuri masalah Islam ini tercermin dalam undang-undang Hindia Belanda ayat 119 RR (Regeerings Reglement / Peraturan Pemerintah) yang berisi kebebasan dalam menganut

---

<sup>8</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hal. 311.

<sup>9</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 12.

<sup>10</sup> VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) adalah perkumpulan perdagangan Belanda yang didirikan pada tahun 1602 dan dibubarkan tahun 1799. Perkumpulan ini berusaha mencari laba sebanyak-banyaknya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk melawan Portugis dan Spanyol.

<sup>11</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam*, hlm. 9.

agama dan perlindungan terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

Kebijakan untuk tidak mencampuri agama ini nampak tidak konsisten sebab tidak ada peraturan yang jelas mengenai persoalan ini. Dalam masalah haji pemerintah kolonial ikut campur tangan, para haji sering dicurigai dan dianggap fanatik serta sering dituduh memberontak pemerintah Belanda. Sebagian besar pemberontakan di Tanah air memang dipelopori oleh para ulama yang telah kembali dari Makkah atau setidaknya tidaknya dari mereka yang telah mendapat pengaruh dari para haji.<sup>13</sup> Para ulama merencanakan pemberontakan karena mereka memandang bahwa penguasa Belanda dan penguasa pribumi yang bekerja sama dengan Belanda adalah golongan kafir. Para ulama ini juga menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk memobilisasi kekuatan.

Meskipun demikian, elit agama pada abad ke-19 ini belum menggunakan Islam sebagai suatu ideologi politik untuk mencapai tujuan dan menata kekuasaan politik. Mereka masih memandang pemerintah penjajah dengan pendekatan syariah atau fiqih, sehingga mereka memandang pemerintah Belanda sebagai pemerintah yang kafir. Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah Belanda mengirimkan konsulnya<sup>14</sup> di Jeddah untuk mengatur dan mengawasi warga jajahannya di tanah suci.<sup>15</sup>

Sejak kedatangan Snouck Hurgonje pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mempunyai beberapa kebijakan yang jelas mengenai Islam. Menurutny di dalam Islam tidak mengenal lapisan kependetaan seperti dalam agama Kristen. Kyai tidak apriori fanatik dan penghulu merupakan bawahan pemerintah pribumi. Ulama independen bukanlah komplotan pemberontak, sebab mereka hanya menginginkan ibadah saja. Pergi menunaikan ibadah haji bukanlah berarti fanatik dan berjiwa pemberontak. Snouck menegaskan bahwa pada hakikatnya orang Islam di Indonesia itu penuh damai, namun dia pun tidak buta terhadap kemampuan politik fanatisme Islam. Bagi Snouck, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>13</sup> M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 263.

<sup>14</sup> Konsul ini bertugas untuk mengatur arus perjalanan jemaah haji Indonesia, terutama dengan berkenaan kepentingan pelayaran pengangkut jemaah haji ataupun menjaga wibawa pemerintah Belanda di mata dunia.

<sup>15</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam*, hlm. 93.

<sup>16</sup> Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, hlm. 44.

Walaupun Islam di Indonesia banyak bercampur dengan unsur animisme dan Hindu, namun Snouck mengetahui bahwa muslim di negeri ini memandang bahwa agamanya merupakan pengikat kuat yang membedakan dirinya dari orang lain. Dalam bidang politik, pemerintah Belanda dengan tegas menolak setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islamisme.<sup>17</sup> Pemerintah kolonial selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang dapat membahayakan kekuasaannya. Dalam hal ini para haji menduduki posisi sangat penting sebagai faktor pembawa pengaruh Pan-Islam dari luar, sehingga mereka pun sering dicurigai dan selalu diawasi oleh pemerintah.

Pemerintahan kolonial Belanda dalam menjalankan ideologi imperialisme klasiknya sangat bernafsu menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia dengan cara memperkokoh kekuasaannya melalui penguasaan politik dan budaya. Belanda dengan watak imperialistiknya tidak bisa melepaskan orientasi kekuasaannya demi memperoleh kehormatan dan harga diri kelas penguasa semata tanpa memedulikan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah.

### **C. PENGARUH IBADAH HAJI TERHADAP MASYARAKAT DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI DAN PENDIDIKAN.**

Ibadah haji merupakan salah satu peribadatan yang bisa dikatakan mencakup isi peribadatan yang lain dalam Islam. Seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, secara spiritual telah sempurna Islamnya. Islam memandang secara seimbang antara nilai materiil dan nilai spiritual. Seseorang yang telah sempurna amal ibadah Islamnya dengan berhaji akan sempurna pula amal usaha keduniannya. Ibadah haji mempunyai pengaruh besar dalam berbagai bidang seperti bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan.

Islam dan politik memiliki hubungan yang erat dalam bentuk interelasi secara fungsional. Dalam bentuk hubungan yang demikian Islam berfungsi sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial umat manusia. Ibadah haji ini memberi dampak yang cukup penting bagi jamaah haji Indonesia karena selain belajar ilmu agama dari Timur Tengah juga

---

<sup>17</sup> Pan Islamisme adalah penyatuan seluruh dunia Islam di bawah satu kekuasaan politik dan agama yang kepalai oleh seorang khalifah serta menghidupkan rasa ukhuwah Islamiyah.

menambah ilmu tentang perpolitikan untuk mengusir penjajah dari tanah airnya. Para jamaah haji ini pada awalnya yaitu abad XVII dan abad XVIII, belum berperan dalam perlawanan terhadap penjajah, kecuali Syekh Yusuf Makassar, yang sepulang dari Haramain ikut berperang di pihak Sultan Agung melawan Sultan Haji yang dibantu Belanda.

Ada dua aspek negatif mengenai para haji. Pertama, para haji dianggap sebagai orang suci, sehingga rakyat sederhana terlalu cepat berkesimpulan bahwa mereka mempunyai kekuatan gaib. Bagi pemerintah Belanda terkadang menganggap bahwa orang Islam yang menunaikan ibadah haji sebagai suatu "golongan pendeta". Secara sosial peranan mereka adalah menghabiskan waktu dengan sembahyang atau melakukan ritual-ritual lainnya. Kedua, adanya unsur politik, para haji memiliki pengaruh politik dan sering berperan sebagai pemimpin suatu gerakan untuk melawan penjajah.

Sebagian besar haji memang tidak terkena pengaruh fanatik di Mekah. Sejak awal mula kedatangannya di Indonesia, Snouck telah berusaha meyakinkan para pejabat kolonial bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan pengaruh haji. Cara mengatasi masalah haji yaitu dengan menghambatnya secara halus dan tidak langsung yakni dengan mengalirkan semangat pribumi ke arah lain.

Pada tahun 1803, tiga orang ulama Minangkabau, Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang kembali dari Mekah. Mereka menginginkan pembersihan praktik-praktik keagamaan yang masih sinkretik, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Wahabi di Mekah. Mereka melihat bahwa kaum Wahabi berhasil menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai Islam. Mereka membawa pulang pemikiran baru yang didapatkan di tanah suci dan menerapkan di daerahnya. Gerakan mereka kemudian dikenal dengan Gerakan Padri. Gerakan ini tujuan awalnya memberantas kebiasaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan agama seperti berjudi, sabung ayam, menggunakan candu dan minum-minuman keras. Akan tetapi gerakan ini mendapat perlawanan dari para penghulu yang tetap mempertahankan adat. Para penghulu yang anti Padri kemudian meminta bantuan kepada pihak Belanda dan meletuslah perang Padri pada tahun 1821-1832.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 215.

Selain itu ada peristiwa yang terjadi di Yogyakarta yaitu perang Diponegoro (1825-1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Meskipun ia belum pernah menunaikan ibadah haji, namun ia mendapat pengetahuan agama dari ulama atau kyai yang pernah melaksanakan haji. Pangeran Diponegoro yang merasa kecewa karena haknya untuk menjadi sultan Yogyakarta telah dirampas, melakukan perlawanan terhadap penguasa Yogyakarta yang bertindak tidak adil dengan berencana membuat jalan menerobos tanah miliknya dan makam yang berada di bawahnya. Ia mendapat bantuan dari kalangan santri yaitu Kyai Madja dan menyatakan perlawanannya itu sebagai perang suci melawan pihak kafir. Mereka memandang bahwa penguasa Yogyakarta telah melakukan penyimpangan agama, termasuk bekerja sama dengan Belanda yang mereka anggap kafir itu.

Para ulama Aceh yang lama tinggal di Mekah dan kembali ke Aceh juga mengambil bagian pada perang Aceh (1873-1912). Para ulama ini terlibat dalam perang ini sebagai bagian dalam menentang agresi Belanda. Selain itu karena agresi ini dilakukan oleh Belanda yang kafir dan pantas dijawab dengan perang atas nama agama. Ada juga pemberontakan yang dilakukan di Cilegon pada 1888.<sup>19</sup> Peranan para haji dalam pemberontakan ini sangat menonjol. Para haji tercatat sebagai pemimpin yang merencanakan dan memantapkan situasi, seperti Haji Abdul Karim, Haji Marjuki, Haji Tubagus Ismail dan Haji Wasid. Dua ulama yang disebutkan merupakan pemimpin langsung pemberontakan. Pemimpin pasukan pada umumnya dan sebagian anak buah mereka terdiri dari para haji.<sup>20</sup>

Di dalam bidang ekonomi haji mempunyai pengaruh yang cukup besar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh rakyat yang ingin melaksanakan ibadah haji adalah kerja keras dan hemat. Sebagian besar jamaah haji di wilayah Hindia Belanda yang berangkat setiap tahun ke tanah suci sebenarnya belum mempunyai bekal materi yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji yang demikian ini disebut "haji miskin" oleh orang Arab di Hijaz.<sup>21</sup> Adanya daya tarik haji yang kuat, seakan-akan mendorong mereka untuk memaksakan diri pergi ke Mekkah, meskipun biaya yang dibutuhkan kurang memadai.

---

<sup>19</sup> Putuhena, *Historiografi Haji*, hlm. 263.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 265.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.336.

Banyak di antara dari jamaah haji yang sebelum berangkat ke tanah suci, mereka bekerja sebagai buruh perkebunan karet dan kelapa sawit di Singapura. Mereka menumpang kapal dagang untuk sampai ke Singapura. Para calon jamaah haji ini terdorong untuk melakukan pekerjaan ini agar mereka dapat mengumpulkan bekal yang cukup untuk berangkat haji. Akan tetapi banyak dari mereka yang meninggalkan pekerjaan itu setelah menunaikan ibadah haji. Ketika kembali ke kampung halaman, mereka telah membawa berbagai pengalaman dan pengetahuan sebagai buruh perkebunan tentang menanam kelapa sawit dan karet. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang haji inilah yang memperkenalkan penanaman karet di Sumatera dan Kalimantan.<sup>22</sup> Penanaman karet dan kelapa sawit merupakan salah satu fungsi ekonomi terpenting dari haji.

Seorang haji yang telah kembali dari Mekah ke Tanah Air akan berusaha agar anggota keluarga yang lain dan keluarganya sendiri bisa melaksanakan haji pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, usaha mereka tidak berhenti sampai di sini. Mereka berusaha mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang dan menggunakannya dengan hemat sehingga ia bisa menabung. Banyak dari calon haji yang pada awalnya jarang untuk menabung, kemudian mereka menyisihkan sebagian uangnya sedikit demi sedikit hingga perjalanan yang sudah lama mereka idam-idamkan dan yang akan memberikan tempat di mata masyarakat untuk selama sisa hidupnya bisa tercapai.<sup>23</sup> Dari hasil usaha kegiatan perekonomian yang sebenarnya belum memuaskan tersebut, mereka akan menabung sampai beberapa tahun untuk biaya mereka naik haji. Pada akhirnya mereka menjadi sebuah golongan baru dan terjadi perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat desa. Haji telah menciptakan sebuah etos bagi umat Islam yaitu kerja keras dan hemat, perubahan budaya ekonomi dari jasa ke uang, menciptakan lapangan pekerjaan serta pengenalan transaksi ekonomi antardaerah. Dalam hal keagamaan mereka juga mengembangkan usahanya dengan mengajar di madrasah-madrasah keagamaan yang juga merupakan sumber penghasilan penting.<sup>24</sup>

Perjalanan haji dari kepulauan Nusantara menuju ke tanah suci telah memengaruhi berdirinya beberapa perusahaan pelayaran khusus

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 337.

<sup>23</sup> Snouck Hurgronje, "Politik Haji?" terj. Soedarso Soekarno, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jld. VIII (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 111.

<sup>24</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 85-86

pengangkut calon jamaah haji. Perusahaan pelayaran untuk pengangkutan jamaah haji dari Hindia Belanda dimulai pada tahun 1825 yang dilakukan oleh Syaikh Umar Bugis, pedagang Arab yang memiliki perusahaan pelayaran.<sup>25</sup> Pada tahun 1874, pengangkutan jamaah haji juga diramaikan oleh perusahaan pelayaran milik pemerintahan Inggris dengan pelabuhan embarkasi Singapura. Melihat Inggris dan pedagang Arab yang meraup keuntungan besar dari bisnis pelayaran ini, Belanda yang sebelumnya enggan untuk mengurus masalah pengangkutan haji pada akhirnya mendirikan tiga perusahaan pengangkutan jamaah haji. Tiga perusahaan tersebut adalah Netherland, Rotterdamsche Llyod, dan Ocean Maatschappij.<sup>26</sup>

Sebagian dari jamaah haji yang sudah selesai melaksanakan haji, banyak dari mereka yang menetap di Mekah selama beberapa tahun lamanya untuk menuntut ilmu dan mereka disebut sebagai *muqimin*. Para *muqimin* ini oleh penduduk setempat disebut *Jawah* atau *Jawi* (orang Jawa) yang bentuk jamaknya *Jawwiyin* (orang-orang Jawa). Jumlah mereka semakin banyak dikarenakan setiap musim haji banyak jamaah yang menetap di Makkah. Pada awal abad ke XX, telah terjadi perubahan signifikan dalam sistem pendidikan agama di Hindia Belanda. Perubahan ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan seperti di Mesir dan Hijaz yang diperkenalkan oleh sebagian haji yang telah pulang ke Tanah Air setelah menyelesaikan pendidikan. Para haji ini memainkan peranan yang cukup penting dalam menyebarkan pendidikan keagamaan di Hindia Belanda.

Di Padang Panjang, Sumatra Barat, pada 1907 didirikan sebuah sekolah yang bernama Adabiyah School/ Madrasah Adabiyah (sekolah peradaban). Sekolah ini didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad, seorang pedagang tekstil yang pernah tinggal di Mekah selama empat tahun (1895-1999).<sup>27</sup> Madrasah ini didirikan atas usul dari teman studi Haji Abdullah Ahmad di Kairo dan Mekah yaitu Thaher Jallaludin yang bertemu dengannya di Singapura tahun 1906. Madrasah ini bertujuan untuk mencetak generasi muslim yang terpelajar, tidak bertaqlid dan bid'ah serta berijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadist.

Selain itu di Padang juga terdapat Surau Jembatan Besi, yaitu sekolah yang memberikan pelajaran agama dengan cara-cara tradisional. Fiqh dan tafsir Quran merupakan pelajaran utama di sekolah ini. Ketika Haji Rasul

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 324.

<sup>27</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* ( Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 46.

(Syaikh Abdul Karim Amrullah) dan Haji Abdullah Ahmad masuk ke sekolah ini pada 1904, pelajaran yang ditekankan adalah pelajaran ilmu alat berupa kemampuan untuk menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya.<sup>28</sup> Haji Rasul pernah tinggal dan melakukan studi di Mekkah selama beberapa tahun sebelum ia mengajar di Surau Jembatan Besi.

Di Yogyakarta terdapat tokoh yang sangat berpengaruh dalam perubahan pendidikan dan kehidupan keagamaan di Indonesia yaitu Ahmad Dahlan. Ia juga tercatat sebagai seorang haji dan tinggal selama beberapa lama di Mekah untuk melanjutkan studinya. Ahmad Dahlan juga pernah mendirikan sekolah di kraton Yogyakarta dengan pengantar bahasa Arab, namun usaha ini tidak berhasil. Pada 1 Desember 1911, ia berhasil mendirikan sebuah sekolah yang berdasarkan sistem pemerintah Belanda. Di sekolah ini ia mengajar pelajaran agama, sedangkan untuk mata pelajaran sekuler diajar oleh beberapa guru pribumi.<sup>29</sup>

#### **D. HUBUNGAN IBADAH HAJI DENGAN ORGANISASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA**

Elite agama abad XIX belum sepenuhnya menggunakan Islam sebagai ideologi politik untuk mencapai tujuan dan menata kekuasaan politik. Mereka masih memandang pemerintah kolonial dengan pendekatan tekstual; syariah atau fiqh dan aqidah atau tauhid. Akan tetapi pandangan dan sikap politik elite agama yang pernah berhaji ke Makkah pada paroh pertama abad XX berbeda dengan ulama abad sebelumnya. Mereka lebih menekankan pada pendekatan kontekstual. Sejalan dengan itu, di kalangan masyarakat muslim mulai timbul gerakan-gerakan pembaharuan yang bertujuan mempersatukan kekuatan muslim untuk melawan hegemoni dari kolonialisme pemerintah Belanda.

Berbagai gerakan pembaharuan banyak dimotori oleh para ulama haji yang telah pulang ke tanah air. Gerakan pembaharuan yang dimunculkan oleh sebagian ulama haji ini melahirkan hubungan kuat antara haji dengan organisasi politik Islam. Organisasi politik Islam merupakan kelompok yang bergerak atau berkepentingan serta terlibat dalam proses politik dan secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut berdasarkan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>29</sup> Putuhena, *Historiografi Haji*, hlm. 370.

nilai-nilai Islam. Sebuah organisasi terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Gerakan-gerakan ini mempunyai misi untuk mengubah suatu pola pemikiran menjadi sebuah tindakan. Beberapa bentuk gerakan tersebut adalah PSII dan Permi.

PSII pada awal mulanya berupa organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhoedi di Surakarta pada tahun 1905, dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggerakannya. Di bawah pimpinan H. Samanhoedi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh

Di Surabaya H.O.S. Tjokroaminoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912. Ia bergabung dengan SDI pada bulan Mei 1912 atas ajakan dari Haji Samanhoedi, kemudian Tjokroaminoto dipilih menjadi pemimpin SDI.<sup>30</sup> Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Oemar Said Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik.

Sarekat Islam tidak bisa dipisahkan dari peran ulama haji seperti Haji Samanhoedi. Ia lahir di desa Sondokrono sebagai seorang anak pedagang batik yang bernama Haji Moehammad Zen. Setelah ia menyelesaikan pendidikan rendahnya di sekolah kelas dua, Samanhoedi membantu ayahnya dalam berdagang batik. Pada tahun 1904 ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan kembali pada tahun berikutnya.<sup>31</sup> Sekembali dari menunaikan ibadah haji, Samanhoedi mempunyai minat yang besar untuk mendirikan sebuah organisasi yang bersifat sosial seperti halnya organisasi yang memberikan bantuan dalam upacara perkawinan maupun keperluan penyelenggaraan kematian. Walaupun pengetahuannya tentang Islam terbatas, ia seorang yang beriman. Dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang muslim yang tipikal pada masanya. Bagi Samanhoedi, Islam lah

---

<sup>30</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam*, hlm. 118.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

yang membedakan dirinya dari orang asing maupun orang yang non-muslim.

Adapun tokoh SI lainnya yang cukup berpengaruh adalah H.O.S Tjokroaminoto, seorang lulusan OSVIA<sup>32</sup> atau yang lazim disebut sekolah administrasi pemerintah Belanda. Meski ia lulusan OSVIA, ia tidak pernah menjadi pegawai pemerintah karena lebih tertarik pada dunia politik. Sebelum bergabung dengan SDI, Tjokroaminoto terkenal dengan kejujuran dan keberaniannya menentang kaum bangsawan feodal. Pada 1926, ia berangkat ke Mekah sebagai wakil dari SI dan pemimpin delegasi umat Islam Indonesia pada Kongres Al-Islam pertama yang diadakan oleh Ibn Saud. Kesempatan itu digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Kongres itu semula akan membicarakan mengenai masalah pembubaran khalifah oleh Mustafa Kemal, namun karena perkembangan politik di Timur Tengah sedang mengalami peningkatan maka masalah tersebut tidak menjadi agenda pembicaraan di kongres tersebut. Pengalaman Tjokroaminoto berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari berbagai belahan dunia telah memengaruhi visi Islam politiknya. Terlebih lagi kegiatan Pan-Islamisme di Timur-Tengah masih hangat diperbincangkan. Setelah selesai melaksanakan kongres, ia kemudian kembali ke Indonesia. Selama kepemimpinannya SI relatif moderat.<sup>33</sup> Di dalam Sarekat Islam, Tjokroaminoto juga dibantu oleh Haji Agus Salim dalam memperjuangkan keberadaan Sarekat Islam. Pengalaman ketika bekerja di Jeddah telah mewarnai pemikiran politiknya di Sarekat Islam. Pada waktu itu, Pan-Islamisme sedang menjadi ideologi yang begitu diminati di dunia Islam. Di waktu yang sama juga mulai berhembus arus modernisme dari Mesir dan gerakan puritanitas yang dipelopori oleh Ibn Abdul Wahab di Hijaz. Agus Salim menjadikan Pan-Islamisme dan modernisme sebagai basis utama untuk aktivitas politiknya.

Gerakan Sarekat Islam pada awalnya lebih merupakan gerakan reaktif terhadap situasi kolonial. Pada tahap-tahap berikutnya gerakan itu melangkah ke arah rekonstruksi kehidupan bangsa, untuk selanjutnya menentukan identitasnya dan akhirnya beralih ke perjuangan politik untuk menentukan nasib sendiri. Di belakang semuanya itu, ternyata ideologi agama mampu memobilisasi massa secara besar-besaran.<sup>34</sup> Banyak

<sup>32</sup> OSVIA (*Opleiding Shoole Voor Inlandsche Ambtenaren*, Sekolah Latihan untuk Pegawai Pribumi)

<sup>33</sup> Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 286.

<sup>34</sup> Pada awal abad 20, berbagai ancaman terhadap tatanan kolonial tampak terlihat dari Pan Islamisme dan fanatisme agama. Snouck Hurgronje, menekankan bahwa musuh bukanlah Islam sebagai agama, melainkan

ketimpangan yang terkandung dalam hubungan sosial dalam masyarakat kolonial dan mulai dirasakan sebagai hal yang tidak wajar. Namun hal yang lebih menyinggung rasa harga diri mereka adalah hal-hal seperti cara memberi hormat; melakukan sembah, duduk bersila di lantai bagi pribumi, sedangkan untuk keturunan Arab maupun Cina duduk di kursi. Di samping itu berbagai diskriminasi juga membangkitkan rasa inferior, seperti kereta khusus pribumi, pakaian, kamar tunggu stasiun, dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Adapun Permi yaitu sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1930.<sup>36</sup> Permi merupakan kelanjutan dari organisasi Sumatera Thawalib yang berada di Minangkabau dan bergerak dalam bidang pendidikan. Sumatera Thawalib sendiri merupakan penerus dari sekolah agama tradisional yaitu Surau Djembatan Besi yang dahulu didirikan pada peralihan abad ke XX oleh Haji Abdullah Ahmad, yang kemudian dilanjutkan oleh Syekh Daud Rasyidi. Pada tahun 1906, Surau Djembatan Besi diasuh oleh Haji Rasul (Syekh Abdul Karim Amrullah), sekembalinya dari Timur-Tengah.<sup>37</sup> Ketika komunis memperluas pengaruhnya di Minangkabau, beberapa orang ulama haji tertarik dengan ideologi kiri. Mereka terpengaruh konsep komunisme Islam yang ditawarkan oleh Haji Misbah dari Surakarta. Komunis di Minangkabau diperkenalkan oleh Haji Datuk Batuah pada tahun 1923.

Pada tahun 1927 sebagai akibat pemberontakan Silungkang, banyak guru-guru Thawalib Padang Panjang dilarang mengajar.<sup>38</sup> Akibatnya sekolah Sumatera Thawalib mengalami kemunduran. Melihat kondisi tersebut, ketua perwakilan Muhammadiyah Sumatera Barat yaitu A.R. St. Mansur memanggil beberapa anggotanya yang berfikiran luas dan maju, untuk meninggalkan Muhammadiyah. Tujuannya yaitu para anggota tersebut akan ditempatkan ke dalam sebuah wadah baru yang berupa organisasi politik yakni Persatuan Sumatera Thawalib.

Persatuan Sumatera Thawalib ini terbentuk pada bulan November 1928 M dalam sebuah kongres yang dihadiri oleh utusan-utusan seluruh

---

Islam sebagai doktrin politik, baik dalam bentuk agitasi melalui fanatik lokal, maupun dalam bentuk Pan Islamisme.

<sup>35</sup> Sartono Kartodirjo, *Sejarah Pergerakan Nasional jld 2, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 108.

<sup>36</sup> Mengenai tahun pendirian Permi terdapat dua pendapat yakni pendapat Aqib suminto, menyatakan tahun 1929, sedangkan menurut deliar Noer dan sumber-sumber lain menyatakan Permi berdiri pada tahun 1930.

<sup>37</sup> Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*, Ithaca, New York: Corne University, 1971), hlm 34-35.

<sup>38</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern*, hlm. 57.

Sumatera Thawalib. Tujuan organisasi ini untuk mengorganisir kegiatan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pada kongresnya yang ketiga di bulan Mei 1930, Persatuan Sumatera Thawalib mengubah dirinya menjadi Persatuan Muslimin Indonesia (PMI atau Permi),<sup>39</sup> suatu organisasi kemasyarakatan berasaskan Islam dan Kebangsaan, yang kemudian menjelma menjadi partai politik Islam yang radikal. Anggota organisasi ini terdiri dari para bekas pelajar dan guru-guru Sumatera Thawalib yang sejak lama menentang ideologi komunis.

Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) dalam waktu dua tahun setelah berdirinya yaitu tahun 1930, berubah menjadi partai politik yang terkuat dan paling berpengaruh di Sumatera Barat. Salah satu penyebab perubahan menjadi partai politik ini adalah karena tidak adanya saluran politik sebagai akibat tertutupnya Muhammadiyah bagi kegiatan politik. Perubahan Permi menjadi partai politik dan menggunakan asas yang berbeda dengan asas organisasi Islam yang lain pada saat itu, yaitu Islam dan Kebangsaan, merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan dalam bidang gerakan politik di Minangkabau untuk melawan hegemoni Belanda. Permi semakin kuat dengan pulangnya dua orang ulama haji Minangkabau yang mendapat pendidikan di Mesir yaitu Ilyas Yakub dan Mukhtar Lutfi.<sup>40</sup>

Ilyas Yakub merupakan seorang ulama haji yang mempunyai andil besar dalam melawan hegemoni Belanda di Sumatera Barat. Ia lahir tahun 1903 di Asam Kumbang (Painan) sebagai seorang anak pedagang tekstil.<sup>41</sup> Pada tahun 1921, Ilyas Yakub berangkat bersama gurunya yaitu Syekh H. Abdul Wahab menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selesai melaksanakan ibadah haji ia masih tinggal di sana selama dua tahun untuk memperdalam ilmu agamanya. Selanjutnya ia meneruskan studinya ke Al-Azhar, Mesir, tetapi tidak sebagai mahasiswa penuh.<sup>42</sup> Ia juga pernah menerbitkan sebuah majalah *Medan Ra'jat* yang berisi tentang perlawanan terhadap Belanda. Ia bersama Mukhtar Lutfi berjuang memimpin Permi melawan penindasan pemerintah Belanda.

Adapun ulama haji lainnya yang berperan dalam kemajuan Permi yaitu Mukhtar Lutfi. Ia dilahirkan di Balingka, Bukit Tinggi, pada tahun 1900.

---

<sup>39</sup> Audre Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (Jakarta: YOI, 2005), hlm. 58-62.

<sup>40</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern*, hlm. 170.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 171

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

Ia merupakan seorang anak ulama yang bernama Haji Abdul Latif. Pada tahun 1911, dalam usia yang masih muda, ia berangkat ke Mekah dan belajar di sana selama tiga tahun.<sup>43</sup> Sesudah pulang ke Minangkabau ia kemudian belajar kepada Haji Rasul. Pada tahun 1926, ia memutuskan untuk pergi ke Mekah lagi menggunakan pasport Inggris. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, ia segera berangkat ke Kairo. Di Kairo sejak permulaan 1926, ia aktif dalam organisasi *Jamiat al Khairiyah* dan juga diskusi-diskusi politik. Di Kairo ia juga bergabung dengan Ilyas Yakub dalam kegiatan politik. Ia mengadakan hubungan dengan aktivis-aktivis di Mesir dan bergabung dengan *Hizb al Wathan*.<sup>44</sup> Ia bersama dengan Ilyas Yakub bersama-sama dalam mengelola majalah *Seruan Azhar dan Pilihan Timur*. Ketika kedua majalah tersebut dilarang beredar di Mesir, ia kemudian diusir dari negeri itu dan memutuskan berpindah ke Mekah selama dua tahun. Pada tahun 1931, Mukhtar Lutfi kembali ke Tanah Air dan bergabung dengan Ilyas Yakub dalam Permi. Mereka berdua berupaya dan menyokong Permi agar lebih berkembang.

Permi merumuskan kebangsaan sebagai cara bertindak dan strategi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, bukan hanya sekedar landasan berpikir. Kebangsaan adalah jalan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Adapun Islam yang menjadi slogan Permi adalah landasan dan i'tikad perjuangan untuk mencapai kemuliaan Islam. Organisasi yang baru dibentuk ini kemudian membagi kerjanya pada empat bagian yaitu politik (ideologi Islam dan Kebangsaan), sosial, ekonomi, dan persamaan hak kemanusiaan.

## PENUTUP

Haji memengaruhi sikap pemerintah Hindia Belanda dalam penerapan politik kolonialisasinya. Belanda memandang masalah tersebut sebagai ibadah yang sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan Belanda di Hindia Belanda. Haji menjadi ibadah yang ditakuti sehingga harus dilarang dan dihalangi. Melalui konsulnya di Jeddah, pemerintah Belanda berupaya selalu mengawasi kegiatan mereka yang pergi ke tanah suci yang berasal dari Hindia Belanda. Pengaruh haji pada awal abad ke XX telah

---

<sup>43</sup> Abdullah, *School and Politicts*, hlm. 145.

<sup>44</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern*, hlm. 172.

memunculkan sikap dan pemikiran politik yang lama-kelamaan menjadi sebuah organisasi politik. Orang Islam yang setelah haji belajar di Kairo, mereka membawa berbagai pemikiran politik yang didapatkan dari studi di Mesir itu ke Tanah Air. Dalam perlawanannya kepada pemerintah Belanda mereka memobilisasi masa serta menggunakan simbol-simbol keagamaan.

Awal mula kemunculan organisasi politik Islam yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah partai politik Islam memang tidak bisa dilepaskan dari peran haji yang pada waktu itu membentuk berbagai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan. Sarekat Islam (SI) kemudian berubah menjadi PSII, pada awalnya berkembang dari sebuah organisasi yang bernama SDI (Sarekat Dagang Islam). Sebagian haji juga bergerak dalam organisasi pendidikan, seperti organisasi Sumatra Thawalib yang kemudian bertransformasi menjadi Permi (Persatuan Muslim Indonesia). Permi merupakan pelopor perjuangan politik yang mengedepankan pemikiran intelektual yang bergerak melalui pendidikan.

Haji mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap munculnya perkembangan pendidikan dan perekonomian. Dalam bidang ekonomi, haji telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi rakyat pedesaan melalui etos kerja dan hemat. Haji telah mendorong pertumbuhan dan mendatangkan keuntungan dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam bidang pendidikan peran serta haji telah memperkenalkan berbagai macam pendidikan keagamaan. Dari model pendidikan yang menggunakan sistem klasikal maupun model pendidikan modern yang mirip dengan sekolah orang-orang Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*. New York: Corne University, 1971.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
- Hurgronje, Snouck. "Politik Haji?" terj. Soedarso Soekarno, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jld. VIII. Jakarta: INIS, 1993.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia Utama, 1999.

- \_\_\_\_\_. *Sejarah Pergerakan Nasional jld 2, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kahin, Audre. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: YOI, 2005..
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mursyidi, Mr Sumuran. *Lintasan Sejarah Jamaah Haji Indonesia*. Jakarta: MARS- 26, 1984.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan, 2001.
- Putuhena, M Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Qadim, Abdul Zallum, *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: Al-Izzah, 2001.
- Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1996.